

**PENGELOLAAN KEUANGAN SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN
DALAM PEMBELANJAAN DANA DESA BERDASARKAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH DI DESA BENUNG KECAMATAN DAMAI
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**Fransiska Marleni Greis¹, Imam Nazarudin Latif², Astrid Napita Sitorus³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : Gresoyen@gmail.com**

Keywords:

*Financial Management,
Village Fund Accountability,
PP No 71 of 2010.*

ABSTRACT

The theoretical basis of this research uses Government Accounting which focuses on recording, reporting and presenting financial statements, PP 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards. Data collection techniques are carried out by means of field research and literature research. Data used to determine and analyze the conformity between the accountability of Benung Village's financial statements and Government Accounting Standards. The analysis tool used is to use qualitative descriptive methods and use the Dean J. Champion formula.

The results of this study show that the application of Government Accounting Standards in village financial accountability. Reporting and financial accountability have not applied government accounting standards, because the financial statements for accountability made by Benung Village are only in the form of Realization Reports and Balance Sheet Reports.

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan hukum di mana masyarakat yang bertempat tinggal di desa tersebut mengatur pemerintahannya sendiri dalam menjalankan pemerintahan desa, penduduk memiliki lembaga-lembaga dan peraturan yang ditetapkan dan dibentuk sendiri oleh masyarakat desa. Desa juga merupakan salah satu sektor pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan harus berfokus pada pembangunan pemerintahan. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa ini mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Riant Nugroho dan Firre An Suprpto (2020:20) Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.

Pengelolaan dana desa termasuk sesuatu yang sangat diperhatikan dalam penerapannya dengan diterbitkannya SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) guna meningkatkan pertanggungjawaban kinerja pemerintah. SAP menjadi prinsip akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, SAP berbasis akrual salah satu standar pencatatan akuntansi yang cocok digunakan untuk melakukan pencatatan dana desa.

Menurut Sukrisno Agoes (2020:12) menjelaskan pengertian akuntansi adalah Suatu sistem informasi yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat dan melaporkan informasi keuangan suatu entitas untuk kepentingan internal maupun eksternal. Informasi yang dihasilkan melalui sistem akuntansi berguna untuk membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan entitas tersebut. Sama halnya menurut Menteri Keuangan RI (No. 476 KMK.01 1991) menjelaskan akuntansi adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, penganalisaan, peringkasan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi keuangan dari kesatuan ekonomi untuk menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Seperti halnya menurut Anwar Sadat (2020:9) pengertian akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut: Proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan seperti pencatatan jurnal, pengikhtisaran buku besar, penyajian laporan keuangan dalam transaksi dan kejadian keuangan.

Dana desa berfungsi untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa yang dapat berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Dana desa juga berfungsi untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dana desa juga digunakan untuk peningkatan gizi masyarakat seperti: penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi bagi balita, bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui. Selain hal tersebut, penggunaan dana desa juga ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa menjelaskan: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada desa guna membiayai pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi desa.

Berdasarkan pendapat Fadillah Amin (2023:68) menjelaskan pengertian anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah Dokumen perencanaan keuangan desa yang dibuat setiap tahun untuk menentukan kebijakan dan program desa dalam menggunakan sumber daya keuangan yang dimilikinya. APBDes memuat rencana kegiatan, sumber pendapatan, dan alokasi belanja desa dalam periode satu tahun.

Menurut Mardiasmo (2021:5) Laporan keuangan pemerintah adalah laporan yang disusun oleh pemerintah untuk menginformasikan kondisi keuangan negara pada suatu periode tertentu. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah aturan pengelolaan keuangan pemerintah tertinggi, sehingga diharapkan semua pelaporan keuangan pemerintah mengacu kepada aturan tersebut, termasuk pelaporan keuangan di desa.

Standar Akuntansi Pemerintah digunakan agar keuangan pemerintah dapat dilaporkan sesuai dengan aturan yang berlaku serta memenuhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang dimaksud komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi berikut: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Entitas, Catatan atas Laporan Keuangan. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi dan perbendaharaan umum dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya.

Desa Benung adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Damai, kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki anggaran pendapatan dan belanja desa Benung pada tahun 2022 yang berjumlah Rp1.901.562.213,00 dan belanja desa tahun 2022 berjumlah Rp1.947.314.400,48 sehingga dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 pendapatan dan belanja desa Benung mengalami defisit sebesar Rp45.752.187,48 pada Tahun 2023 anggaran pendapatan dan belanja desa Benung tahun 2023 berjumlah Rp2.116.744.188,00 dan belanja desa tahun 2023 berjumlah Rp2.230.057.027,00 sehingga dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 pendapatan dan belanja desa Benung juga mengalami defisit sebesar Rp113.312.839,00.

Belanja desa lebih besar dibandingkan anggaran desa, maka desa tersebut mengalami defisit (kekurangan dana) dan laporan keuangannya akan mencerminkan situasi tersebut. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi keadaan keuangan desa dan mengancam keberlanjutan pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan. Desa mungkin harus mencari sumber pembiayaan tambahan atau memotong belanja pada program tertentu untuk mengatasinya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk mengelola anggaran belanja dengan baik agar tidak ada penyalahgunaan anggaran dana desa dan dengan cermat mengambil tindakan yang tepat jika terjadi ketidaksesuaian antara belanja dan anggaran yang ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Benung dengan judul “Pengelolaan Keuangan Sebagai Pertanggungjawaban Pembelanjaan Dana Desa Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Di Desa Benung Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian laporan pertanggungjawaban pembelanjaan dana desa pada Desa Benung berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP No. 71 Tahun 2010.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan dan menguraikan data yang ada dilapangan, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti untuk menarik kesimpulan generalisasi yang bersifat umum.

Alat ukur dilakukan untuk menghitung kesesuaian dalam penelitian ini, dengan menggunakan rumus champion yang dikemukakan oleh Dean J. Champion dalam bukunya tentang *Basic Statistic for social research* tahun 1990. Perhitungan dengan menggunakan rumus champion yaitu dengan cara :

$$\text{Presentase} : \frac{\sum \text{jumlah jawaban "sesuai"}}{\sum \text{Total Pemanding}} \times 100\%$$

Hasil jawaban yang diperoleh dengan cara perhitungan diatas, dapat disimpulkan dengan klasifikasi kriteria nilai persentase sebagai berikut :

Klarifikasi Kriteria Nilai Persentase

Presentase	Kriteria
0% - 25%	Dikategorikan tidak sesuai
26% - 50%	Dikategorikan kurang sesuai
51% - 75%	Dikategorikan cukup sesuai
76% - 100%	Dikategorikan sesuai

Sumber : Dean J. Champion, 1990

Jangkauan pada penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Benung Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini difokuskan pada Pelaporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pembelanjaan Dana Desa Dalam Pengelolaan Keuangan berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Per Tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Benung adalah salah satu desa di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Memiliki luas 3380 (ha) km² dan jumlah penduduk sekitar 356 jiwa dengan kepadatan 0,09 jiwa/km². Desa Benung memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, seperti kelapa sawit, karet dan durian dengan demikian sektor pertanian menjadi sektor yang cukup potensial di desa ini.

Desa Benung juga memiliki beberapa objek wisata alam yang cukup menarik seperti, air terjun dan hutan belantara yang masih asri namun, pengembangan pariwisata di desa ini masih sangat minim dan perlu dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, desa Benung memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan yang sudah cukup memadai, terutama dengan adanya posyandu dan puskesmas yang melayani masyarakat setempat, terdapat juga berbagai sarana dan prasarana lainnya seperti jalan raya, jembatan, serta listrik yang sudah terpasang.

Analisis

Kesesuaian Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pembelanjaan Dana Desa Benung dengan Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010

Laporan Keuangan Dana Desa Berdasarkan SAP PP No. 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Kantor Kepala Desa Benung	Sesuai	Tidak Sesuai
---	--	--------	--------------

<p>Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos berikut:</p> <p>a. Pendapatan-LRA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan pajak daerah - Pendapatan retribusi daerah <p>b. Belanja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja operasi • Belanja modal • Belanja tak terduga <p>c. Transfer</p> <p>d. Surplus/defisit-LRA</p> <p>e. Pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan pembiayaan • Pembiayaan netto <p>f. Silpa/sikpa.</p>	<p>Laporan Realisasi Anggaran Disajikan oleh kantor desa Benung sebagai berikut:</p> <p>a. Pendapatan LRA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli desa <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Transfer <p>b. Belanja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja operasi • Belanja modal • Belanja tak terduga <p>d. Surplus/defisit LRA</p> <p>c. -</p> <p>e. Pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan pembiayaan • Pembiayaan netto <p>f. Silpa/Sikpa</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p>
<p>Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan perubahan SAL sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saldo anggaran lebih awal - Penggunaan SAL - Silpa/Sikpa - Koreksi Kesalahan - Saldo anggaran lebih akhir 	<p>Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih kantor desa Benung tidak menyajikan laporan perubahan SAL</p>		<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>

Dilanjutkan

Lanjutan

<p>Laporan Keuangan Dana Desa Berdasarkan SAP PP No. 71 Tahun 2010</p>	<p>Laporan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Kantor Kepala Desa Benung</p>	<p>Sesuai</p>	<p>Tidak Sesuai</p>
--	---	---------------	---------------------

<p>Neraca Mencantumkan pos-pos berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aset lancar <ul style="list-style-type: none"> • Kas dan Setara Kas • Piutang • Investasi jangka pendek • Persediaan - Aset Non lancar <ul style="list-style-type: none"> • Investasi jangka panjang • Aset tetap • Dana cadangan • Aset lainnya - Kewajiban <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban jangka pendek • Kewajiban jangka panjang - Ekuitas 	<p>Neraca Pos-pos yang disajikan Kantor desa Benung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aset lancar <ul style="list-style-type: none"> • Kas dan Setara kas • Piutang • • Persediaan - Aset Non lancar <ul style="list-style-type: none"> • Investasi Permanen • Aset tetap • Dana cadangan • Aset lainnya - Kewajiban <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban jangka pendek • - Ekuitas 	<p>√ √ √ √ √ √ √ √ √ √</p>	<p>√ √ √</p>
<p>Laporan Operasional Menyajikan pos-pos sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan-LO b. Beban c. Transfer d. Pos luar biasa e. Surplus/defisit-LO 	<p>Laporan Operasional Kantor Desa Benung tidak menyajikan Laporan Operasional</p>		<p>√ √ √ √ √</p>
<p>Laporan Arus Kas Menyajikan informasi arus kas masuk dan arus kas keluar, perubahan kas dan setara kas dengan aktivitas sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas operasi - Aktivitas investasi - Aktivitas pendanaan - Aktivitas transitoris 	<p>Laporan Arus Kas Kantor Desa Benung, tidak menyajikan Laporan Arus Kas</p>		<p>√ √ √ √</p>

Dilanjutkan

Lanjutan

<p>Laporan Keuangan Dana Desa Berdasarkan SAP PP No. 71 Tahun 2010</p>	<p>Laporan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Kantor Kepala Desa Benung</p>	<p>Sesuai</p>	<p>Tidak Sesuai</p>
--	---	---------------	---------------------

Laporan Perubahan Ekuitas Menyajikan pos-pos sebagai berikut: a. Ekuitas awal b. Surplus/defisit-LO c. Koreksi nilai persediaan d. Selisih revaluasi aset tetap e. Ekuitas akhir	Laporan Perubahan Ekuitas Kantor Desa Benung tidak menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas		√ √ √ √ √
Catatan atas Laporan Keuangan Disajikan secara sistematis setiap pos dalam;: - Laporan Realisasi Anggaran - Laporan Perubahan SAL - Neraca - Laporan Operasional - Laporan Arus Kas - Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dengan informasi terkait dalam CaLk.	Catatan atas Laporan Keuangan Pos yang disajikan pada kantor desa Benung: - Laporan Realisasi Anggaran - Neraca - Laporan Perubahan SAL - Laporan Operasional - Laporan Arus Kas - Laporan Perubahan Ekuitas	√ √	√ √ √ √
Total Jawaban		24	28

Sumber : Data Diolah 2023

Kesesuaian laporan keuangan pertanggungjawaban pembelanjaan dana desa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah PP No 71 tahun 2010 dengan Menurut Pemerintah Desa Benung ditemukan 24 jawaban “sesuai” dari 52 pembandingan, maka dapat dirumuskan dengan rumus perbandingan Dean J. Champion adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
\text{Presentase} &= \frac{\sum \text{jumlah jawaban "sesuai"}}{\sum \text{Total Pembandingan}} \times 100\% \\
&= \frac{24}{52} \times 100\% = 46\%
\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan kesesuaian laporan keuangan pertanggungjawaban dana desa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah PP No 71 tahun 2010 dengan menurut Pemerintah Desa Benung, dapat disimpulkan bahwa hasilnya berada pada kategori kurang sesuai sebesar 46% yang masuk dalam kriteria *presentase* 26% - 50% dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP No 71 Tahun 2010.

Pembahasan

1. Laporan Realisasi Anggaran

laporan realisasi anggaran (LRA) pada Desa Benung Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat terdapat pos-pos pendapatan-LRA terdiri atas pendapatan asli desa dan pendapatan transfer, belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, surplus/defisit,

pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pembiayaan netto, silpa/sikpa. Maka, laporan realisasi anggaran (LRA) pada Desa Benung Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat sudah sesuai dengan SAP PP No 71 Tahun 2010 walaupun ada pos yang belum disajikan seperti pos pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi, dan pendapatan lain-lain juga pos transfer dimana pos-pos tersebut tidak ada dikarenakan laporan realisasi anggaran di desa Benung hanya berfokus pada belanja atau pengeluaran, karena pengeluaran merupakan hal yang paling sering menjadi sorotan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga hal ini dapat mengabaikan pentingnya melaporkan secara lengkap semua jenis.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya berdasarkan tabel 5.1 dapat diketahui bahwa laporan perubahan SAL pada PP 71 Tahun 2010 terdapat pos-pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan SAL, silpa/sikpa, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih. Pada Desa Benung Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan SAP PP No 71 Tahun 2010 terlihat dari Desa Benung yang tidak menyajikan laporan perubahan SAL. Desa Benung Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat tidak menyajikan laporan perubahan SAL karena kurangnya kesadaran mengenai pentingnya penyajian laporan perubahan SAL dimana laporan perubahan saldo anggaran lebih dapat membantu dalam memantau dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara lebih efektif dan efisien.

3. Neraca

Desa Benung menyajikan neraca atau yang biasanya dikenal oleh pemerintah desa dengan LKMD yang memiliki format yang relatif sama dengan neraca dalam laporan neraca desa Benung dengan pos-pos sebagai berikut: Aset, Aset lancar terdiri atas kas dan setara kas, Piutang, investasi jangka pendek, persediaan. Aset non lancar terdiri atas investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, aset lainnya, dan Kewajiban yang terdiri Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dan terakhir ekuitas. Pada Desa Benung Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat cukup sesuai dengan SAP PP No 71 Tahun 2010 walaupun ada pos yang belum disajikan seperti pos persediaan, investasi jangka panjang yang mana pada Desa Benung dimuat dalam investasi permanen dan kewajiban jangka panjang.

4. Laporan Operasional

Berdasarkan tabel 5.1 dapat diketahui bahwa laporan operasional (LO) pada PP 71 Tahun 2010 mencakup pos-pos sebagai berikut: Pendapatan-LO, Beban dari kegiatan operasional, Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, Pos luar biasa, Surplus/defisit-LO. Desa Benung Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat masih tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dikarenakan desa Benung tidak menyajikan laporan operasional tidak adanya laporan operasional di Desa Benung karena keterbatasan sumber daya manusia dalam menyusun dan menghasilkan laporan operasional hal ini juga dijelaskan pada wawancara ke kepala desa, sekdes dan staf di Desa Benung di mana dalam wawancara sebut dijelaskan bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh desa Benung salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola dana desa tersebut.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Menyajikan informasi arus kas masuk dan arus kas keluar, perubahan kas dan setara kas dengan aktivitas sebagai berikut: Aktivitas operasi, Aktivitas investasi, Aktivitas

pendanaan, Aktivitas transitoris berdasarkan tabel 5.1 dapat diketahui bahwa Desa Benung Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan SAP PP No 71 Tahun 2010 karena kantor Desa Benung tidak menyajikan laporan arus kas alasan kenapa laporan arus kas pada desa Benung tidak disajikan dalam laporan pertanggungjawabannya adalah karena peraturan tersebut dapat diinterpretasikan berbeda oleh pemerintah desa. Meskipun PP No 71 tahun 2010 menetapkan bahwa laporan arus kas harus ada, pelaporan keuangan pada pemerintahan desa selama ini masih cenderung mengutamakan laporan keuangan berbasis kas.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut: Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, dan Ekuitas akhir. Berdasarkan tabel 5.1 dapat diketahui bahwa laporan perubahan ekuitas Desa Benung Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan SAP PP No 71 Tahun 2010 karena kantor desa Benung juga tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas karena dianggap kurang relevan dengan desa lebih fokus pada pengelolaan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan penggunaan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan keuangan desa pada tahun anggaran 2022 ditinjau dari kesesuaian laporan keuangan dana desa pada Desa Benung Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat menunjukkan bahwa belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah PP No 71 Tahun 2010, tidak maksimalnya pelaporan keuangan desa di Desa Benung disebabkan beberapa hal antara lain, tidak memiliki laporan rencana kegiatan, anggaran desa serta rencana kerja kegiatan desa dan tidak memiliki laporan arus kas.

Saran

Dari kesimpulan yang ada maka dari itu dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi Desa Benung secara khusus agar semakin meningkatkan pengelolannya dalam pertanggungjawaban menjadi lebih baik lagi sesuai dengan acuan yang terdapat dalam SAP PP No 71 Tahun 2010.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Benung belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh perangkat desa terutama dalam melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk pelaporan pertanggungjawaban baik itu kepada Bupati Kutai Barat maupun kepada masyarakat.

REFERENCES

Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (1)
_____,Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

- _____, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (No. 476.Kmk 01 1991) Tentang Akuntansi
- _____, Peraturan Menteri No 71 Tahun 2010, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 Penyajian Laporan Keuangan.
- Agoes, S. (2020). *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amin, F. (2023). *Keuangan Pemerintah Desa Sumber Pendapatan, Alokasi Belanja, dan APBDesa*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang : Tim UB Press.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Riant Nugroho, & Firre An Suprpto. (2020). *Keamanan Desa Bagian 1: Konsep Dasar*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sadat, A. (2020). *Governmental Accounting (Akuntansi Pemerintahan)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.